

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENSEJAHTERAKAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh:

ERIKA AYUNING WULANDARI
NPM. 21801091087



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
MALANG
2025

RINGKASAN

Erika Ayuning Wulandari, 21801091087, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2025, **“Peran Dinas Sosial Dalam Mensejahterakan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Malang”**, Dosen Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin., M. Si, Dosen Pembimbing 2 : Retno Wulan Sekarsari S. AP., M. AP., M. Pol. Sc.,

Akibat laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat akan berdampak pada segi lingkungan, segi kesehatan dan tidak hanya itu saja tetapi juga akan berdampak pada segi ekonomi, hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat dengan masalah ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Peranan atau peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Penelitian ini menggunakan Grand Teori Kesejahteraan Sosial menurut Fahrudin (2012) Hal ini sejalan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, di mana peneliti sebagai instrumen utama berperan aktif dalam menggali data dari sumber-sumber yang relevan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2023:15), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh melalui interaksi langsung dengan objek yang diteliti dalam kondisi alamiah. Oleh karena itu, keberadaan peneliti di lokasi penelitian sangat penting untuk mengidentifikasi dinamika pelayanan kesejahteraan secara langsung, termasuk hambatan, tantangan, dan strategi penanganan terhadap kesejahteraan gelandangan dan pengemis.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Peran pemerintah adalah segala bentuk tanggung jawab, kewenangan, dan tindakan yang dilakukan Melalui kebijakan tersebut, Dinas sosial menetapkan langkah-langkah penanganan, baik preventif maupun rehabilitatif. Seluruh proses ini dijalankan melalui koordinasi lintas sektor antara berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan relawan. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan gelandangan dan pengemis tidak hanya tertib secara sosial, tapi juga mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Dapat disimpulkan dengan adanya Peran Dinas Sosial Kota Malang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial dapat dijalankan secara optimal namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Saran kepada Dinas Sosial yaitu perlu dilakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di jalan dengan diadakanya razia secara berlanjut serta perlu adanya himbauan kepada masyarakat terkait larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis berupa Peraturan Perundang-Undangan atau Plakat pada Lampu Lalu Lintas agar dapat dipahami masyarakat dengan mudah.

KATA KUNCI : Peran, Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Publik

SUMMARY

Erika Ayuning Wulandari, 21801091087, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2025, **"The Role of Social Services in Improving the Welfare of Homeless and Beggars in Malang City"**, Supervisor 1: Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin., M. Si, Supervisor 2: Retno Wulan Sekarsari S. AP., M. AP., M. Pol. Sc.,

As a result of the rapid population growth rate, it will have an impact on the environment, health and not only that but also on the economy, it also greatly affects the welfare of society. The general problem of vagrants and beggars is essentially closely related to the problem of order and security in urban areas. Role or role is a dynamic aspect in position (status). If someone carries out his rights and obligations according to his position, then he is carrying out a role.

This study uses the Grand Theory of Social Welfare according to Fahrudin (2012). This is in line with the qualitative approach used in this study, where the researcher as the main instrument plays an active role in exploring data from relevant sources. As explained by Sugiyono (2023:15), the qualitative approach aims to understand the phenomenon in depth and comprehensively through direct interaction with the object being studied in natural conditions. Therefore, the presence of researchers at the research location is very important to identify the dynamics of welfare services directly, including obstacles, challenges, and strategies for handling the welfare of homeless people and beggars.

The results of the study conducted by the author show that the role of government is all forms of responsibility, authority, and actions taken. Through this policy, the Social Service determines handling steps, both preventive and rehabilitative. This entire process is carried out through cross-sector coordination between various government agencies such as the Social Service, Health Service, and involving non-governmental organizations and volunteers. With good cooperation, it is hoped that homeless people and beggars will not only be socially orderly, but also get a more prosperous and dignified life.

It can be concluded that with the Role of the Malang City Social Service, social welfare services can be carried out optimally but have not been fully implemented. Suggestions for the Social Service are that it is necessary to supervise vagrants and beggars who are still roaming the streets by holding continuous raids and there needs to be an appeal to the public regarding the prohibition of giving money to vagrants and beggars in the form of Legislation or Plaques on Traffic Lights so that they can be easily understood by the public.

KEYWORDS: Role, Social Welfare, Public Services

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki penduduk yang relatif tinggi dan padat, menempati peringkat keempat di dunia dalam hal pertumbuhan penduduk. Meskipun merupakan negara kepulauan dengan pendapatan menengah, Indonesia masih dianggap sebagai negara berkembang. Setiap negara berkomitmen untuk maju, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Akibatnya, Indonesia menjadi negara berkembang dengan banyak kendala yang harus diatasi. Akibat laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat akan berdampak pada segi lingkungan, segi kesehatan dan tidak hanya itu saja tetapi juga akan berdampak pada segi ekonomi, hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan begitu negara Indonesia mengharuskan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar dapat mempertahankan negaranya. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya negara Indonesia tidak terlepas dari arah pembangunan negara. Dapat dikatakan bahwa pembangunan suatu negara menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Bersumber pada Pancasila serta Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, memberikan kerangka dasar guna mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara menyeluruh (baik material maupun spiritual). Negara memiliki peran krusial dalam meningkatkan taraf hidup rakyat, dan pembangunan bertujuan guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi guna mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, salah satu aspek terpenting dari pembangunan adalah penciptaan lapangan kerja. Namun, distribusi kesejahteraan seringkali tidak seimbang dalam proses pembangunan, yang mengakibatkan ketimpangan.

Budaya pedesaan telah lama dipengaruhi oleh kesulitan kependudukan dan urbanisasi, dan keinginan penduduk pedesaan untuk pindah ke kota dipengaruhi oleh variasi regional. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kota kecil, kota besar biasanya menawarkan lebih banyak prospek kerja. Todarto dan Stephen (2011) menyatakan bahwa urbanisasi yang pesat di negara-negara berkembang merupakan salah satu tren demografi terpenting di zaman kita. Pada tahun 2010, terdapat lebih dari 3,4 miliar orang yang tinggal di kota di seluruh dunia. Wilayah metropolitan di negara-negara berkembang merupakan rumah bagi lebih dari tiga perempat populasi urban. Sepanjang proses pembangunan, jelas bahwa urbanisasi dan pendapatan per kapita berkorelasi positif. Semakin banyak orang yang tinggal di wilayah perkotaan, semakin maju suatu negara dalam hal PDB per kapita.

Di Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan enklave yang terletak di dataran tinggi, dengan luas 145,28 km². Kota Malang ialah bagian dari Malang Raya, sebuah wilayah yang juga mencakup Kota Batu dan Kab. Malang. Wilayah administratif Kota Malang dibagi jadi puluh tujuh desa dan lima kecamatan. Kota Malang, yang merupakan rumah bagi sejumlah universitas bergengsi, dikenal sebagai pusat pendidikan. Kota ini juga merupakan tujuan wisata populer karena udaranya yang sejuk dan lingkungan alamnya yang memukau, termasuk

pegunungan. Malang sangat menarik bagi orang-orang dari berbagai kabupaten. Daya tarik ini ditunjukkan oleh sejumlah elemen, seperti keberadaan tempat kerja, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan tempat makan, yang semuanya menarik orang-orang dari pedesaan ke Malang untuk mencari keberuntungan.

Saat ini, jumlah penduduk Kota Malang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan dan luar provinsi. Statistik penduduk Kota Malang dari tahun 2019 hingga 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Malang
Jumlah Penduduk Pertahun (Ribuan Jiwa)

Tahun	2020	2021	2022
Kota Malang	843. 810	844. 933	846. 126

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Tabel 1.1 menyimpulkan bahwa populasi Kota Malang sedang meningkat. Kepadatan akibat peningkatan ini dapat mengakibatkan ketimpangan dan persaingan antara penduduk lokal dan perkotaan. Banyak orang mungkin menjadi tunawisma untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akibat pengangguran yang disebabkan oleh urbanisasi dan prospek kerja yang tidak seimbang. Karena kurangnya tempat tinggal atau bahkan pekerjaan, para tunawisma ini bergantung pada kebaikan orang lain untuk bertahan hidup. Pengemis dan gelandangan diklasifikasikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Gelandangan didefinisikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai orang-orang yang berkeliaran di jalanan, tidak memiliki tempat kerja atau perumahan tetap, dan hidup dalam kondisi yang jauh di bawah standar hidup

minimum di komunitas mereka. Pengemis ialah mereka yang mencari nafkah dengan mengemis di ruang publik buat beberapa tujuan dengan harapan mendapatkan belas kasihan orang lain.

Dalam konteks permasalahan ini, mengemis dan tunawisma merupakan masalah sosial yang serius. Di wilayah perkotaan, baik kota besar ataupun kota kecil, perilaku ini telah jadi masalah sosial. Hal ini disebabkan oleh sejumlah variabel yang berkontribusi terhadap keberadaannya tetapi belum ditangani secara efektif dari sumbernya. Kemiskinan, pendidikan yang tidak memadai, kurangnya keterampilan kerja, lingkungan sosial budaya, kesehatan, dan faktor-faktor lainnya berpadu menciptakan masalah sosial tunawisma dan pengemis. Lebih lanjut, jumlah tunawisma dan pengemis dapat meningkat tajam jika masalah ini dibiarkan tanpa penanganan.

Berdasarkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), jenis PMKS Kota Malang tahun 2019–2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis PMKS dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa)

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis PMKS dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa)		
Jenis PMKS	Tahun	
	2019	2020
Anak Balita Terlantar	4	4
Anak Dengan Disabilitas	212	192
Anak Jalanan	84	24
Anak Terlantar	19	12
Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	11	31
Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	15	5
Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	35	101
Korban Bencana Alam	263	0

JUMLAH	634	369
--------	-----	-----

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Berdasarkan pada Tabel 1.2 diketahui jika jumlah dari tahun pertahun mengalami kenaikan dan penurunan, hasil dari rekapitulasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini belum menentu dikarenakan belum keseluruhan gelandangan serta pengemis yang terdata secara luas serta terperinci, hal tersebut yang membuat masih banyaknya gelandangan serta pengemis yang belum mendapatkan kesejahteraan di Kota Malang.

Beberapa orang menjadi gelandangan karena berbagai alasan, termasuk masalah ekonomi, geografis, sosial, pendidikan, psikologis, budaya, lingkungan, dan agama yang mencegah mereka mendapatkan pekerjaan yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat 1 UU tersebut, mengatakan jika setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan, tempat tinggal, lingkungan hidup yang layak, serta kemampuan hidup sejahtera lahir serta batin.

Pengemis serta tunawisma membutuhkan bantuan tidak hanya berupa uang tunai atau barang untuk konsumsi langsung, tetapi yang lebih penting, perawatan kesehatan mental, pendidikan, dan pelatihan agar dapat hidup bermartabat dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan mereka. Baik tunawisma maupun pengemis membutuhkan perawatan kesehatan mental, terutama mereka yang skizofrenia dan memiliki kondisi mental abnormal. Memperbaiki kehidupan tunawisma serta pengemis yang sehat fisik serta mentalnya bisa dilaksanakan dengan mencuci otak mereka untuk membuka pikiran dan mengubah perspektif

mereka dari "pasrah" menjadi "pasrah lebih baik daripada pasrah." Hal ini akan memungkinkan mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan bekerja sesuai norma dan nilai, alih-alih bertahan hidup di jalanan dan mengemis. Meningkatkan kesehatan mental saja tidak cukup untuk membantu pengemis dan tunawisma menjalani kehidupan yang layak. Pendidikan dan pelatihan sosial dan keterampilan harus diberikan bersamaan dengan pengembangan mental.

Persoalan keamanan dan ketertiban umum di perkotaan pada dasarnya berkaitan erat dengan permasalahan tunawisma dan pengemis yang lebih luas. Meningkatnya tunawisma dan pengemis dianggap membuka peluang bagi gangguan terhadap keamanan serta ketertiban umum, pada akhirnya akan membahayakan stabilitas pertumbuhan perkotaan. Negara berkewajiban untuk mengatasi permasalahan tunawisma dan pengemis. Menurut Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." Ditegaskan dalam Pasal 34 ayat 2, bahwa "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan umat manusia." Oleh karena itu, menurut Pasal 34 UUD, negara menjamin kesejahteraan fakir miskin serta anak terlantar, tidak hanya dengan memberikan bimbingan agar mereka tidak menjadi tunawisma dan pengemis, tetapi juga dengan memberikan perlindungan agar mereka merasa aman serta pendidikan dan bimbingan agar mereka tidak menyimpang. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang baik bagi seluruh rakyat, sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945. Agar para gelandangan, pengemis, dan masyarakat rentan lainnya dapat hidup lebih sejahtera, Pemerintah Kota Malang harus memberikan perhatian kepada mereka.

Meskipun Pemerintah Kota Malang serta Dinsos Kota Malang sudah berupaya keras buat mengendalikan mereka di beberapa wilayah kota, keberadaan mereka masih tersebar luas. Oleh karena itu, diperlukan penanganan khusus agar pengemis dan tunawisma dapat kembali menjalani kehidupan yang layak. Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2013 mengatur penanganan pengemis dan tunawisma. Penanganan ini bertujuan:

- a. Menghentikan dan memperkirakan jumlah pengemis, gelandangan, dan anak jalanan.
- b. Menghentikan kelompok tertentu dari penganiayaan terhadap pengemis, gelandangan, serta anak jalanan.
- c. Mendidik pengemis, gelandangan, serta anak jalanan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang terhormat dan bermartabat bersama masyarakat lainnya.
- d. Mendorong kemandirian ekonomi dan sosial pengemis, gelandangan, dan anak jalanan.
- e. Menyampaikan isu anak jalanan, gelandangan, serta pengemis kepada pemerintah daerah, dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya.

Peranan atau peran merupakan aspek status yang dapat berubah. Seseorang dikatakan menjalankan perannya ketika ia melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan statusnya. Oleh karena itu, seseorang telah memenuhi tugasnya jika ia melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya sesuai dengan posisinya dalam suatu organisasi dan masyarakat.

Hal ini mengakibatkan berbagai masalah sosial, termasuk gelandangan dan pengemis, yang keberadaannya semakin meningkat, meskipun pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Tetapi pemerintah tidak akan lepas tanggung jawab begitu saja untuk bisa mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Tentu saja, masyarakat sipil, swasta, dan lembaga pemerintah lainnya terlibat dalam masalah gelandangan serta pengemis di Kota Malang. Mereka bekerja sama guna mengatasi masalah kesejahteraan sosial, khususnya fokus penelitian pada gelandangan serta pengemis. Dinas Sosial masih menghadapi tantangan dalam menjalankan tanggung jawab dan kegiatannya yang dapat menghambat kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, Dinas Sosial Kota Malang belum menjalankan perannya secara optimal. Berdasarkan observasi dan wawancara, penulis menemukan sejumlah permasalahan terkait fungsi Dinas Sosial Kota Malang, antara lain:

1. Belum dilakukannya intervensi langsung terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Malang.

“Selama ini masalahnya itu para gelandangan dan pengemis masih berserakan di jalanan mbak, meskipun sudah kami fasilitasi dengan bentuk fasilitas rumah rehabilitasi untuk menjalani pelatihan usaha-usaha kecil tetapi tetap saja setelah itu para gelandangan dan pengemis kembali lagi ke jalanan. Memang untuk permasalahan perlu adanya campur tangan perwakilan dari pihak dinas sosial untuk turun langsung dalam melakukan razia, karena untuk razia sendiri saat ini masih menunggu keterlibatan gerak sigap dari pihak satpol pp untuk membasmi adanya gelandangan dan juga pengemis di jalanan secara menyeluruh terutama di lingkup Kota Malang yang membutuhkan waktu lumayan lama dalam menjangkau satu persatu keberadaan para gelandangan dan pengemis di area kota malang (Wawancara dengan Ibu Henny, Koordinasi Sub Rehsos Disabilitas dan Tuna Sosial, pada tanggal 18 Februari 2022).”

Bersumber pada hasil wawancara sebelum penelitian penulis menyimpulkan jika dalam menangani permasalahan sosial gelandangan serta pengemis tidak hanya

menunggu pihak Satpol PP dalam melakukan razia tetapi juga perlu adanya turutan langsung oleh pihak Dinas Sosial dalam menjangkau satu persatu titik dimana keberadaan gelandangan serta pengemis yang masih banyak berkeliaran disudut dan jalanan Kota Malang.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat terhadap Gelandangan dan Pengemis

“Sebagai anggota dinas sosial sendiri, tentunya kita juga butuh bantuan dari pihak luar dinas sosial seperti keterlibatan satpol PP untuk mengangkut pengemis dan gelandangan, tetapi perlu juga campur tangan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harusnya juga ikut melapor daerah mana saja yang masih terdapat gelandangan dan pengemis agar memudahkan kita untuk menanggulangi pemberantasan gelandangan dan pengemis di daerah kota malang ini.” (Wawancara dengan Ibu Sisil, Staff Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, pada tanggal 18 Mei 2022)

Bersumber pada hasil wawancara sebelum penelitian penulis menyimpulkan jika dalam menangani permasalahan sosial gelandangan dan pengemis juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam memberantas masalah sosial agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata dan mengurangi adanya gelandangan dan pengemis terutama di Kota Malang.

3. Sulit mengubah minset/ pola pikir dan hidup mandiri

“Kebanyakan dari mereka para gelandangan dan pengemis ini memiliki pola pikir yang belum terbuka, jadi meskipun sudah dilakukan bantuan pelatihan dan sosialisasi di tempat rehabilitasi mereka akan tetap kembali turun kejalanan karena pada dasarnya mereka sudah terpengaruh oleh lingkungan atau memang dari keluarganya juga yang dari kalangan keluarga gelandangan dan pengemis nah hal itu yang membuat mereka para gelandangan dan pengemis kembali lagi kejalanan.” (Wawancara dengan Ibu Laily, Koordinasi Sub Rehabilitasi Sosial Anak dan lanjut Usia, pada tanggal 3 Juni 2022)

Bersumber pada hasil wawancara sebelum penelitian penulis menyimpulkan jika dalam merubah pola pikir dari para gelandangan serta pengemis

tersebut masih sangat sulit untuk menjadikan kehidupan yang mandiri dan lebih layak.

4. Keterbatasan Anggaran

“Keluaran Anggaran yang di dapat dari kami (Dinas Sosial Kota Malang) masih belum mendapat jumlah dana yang besar atau bisa dikatakan dananya yang turun dari pusat terbatas mbak. Hal ini ditandai dengan keterbatasan biaya yang digunakan untuk kebutuhan pokok di tempat rehabilitasi untuk pengemis dan gelandangan.” (Wawancara dengan Ibu Titik, Kabid Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, pada tanggal 26 Juli 2022)

Bersumber pada hasil wawancara sebelum penelitian penulis menyimpulkan jika dalam memaksimalkan kegiatan penanganan gelandangan serta pengemis tentunya Dinas Sosial Kota Malang memerlukan anggaran yang memadai, sehingga dapat menunjang kesejahteraan sosial masyarakatnya. Tapi pada kenyataannya dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial Kota Malang memiliki keterbatasan anggaran dalam mengalokasikannya.

Bersumber pada latar belakang yang sudah diuraikan, sehingga peneliti memutuskan guna melaksanakan melakukan penelitian berjudul **“Peran Dinas Sosial Dalam Mensejahterakan Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang.”**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang sudah diuraikan, sehingga bisa mendukung akan diangkatnya pada penelitian yakni:

1. Bagaimana peran dinas sosial dalam mensejahterakan gelandangan dan pengemis di Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mensejahterakan gelandangan dan pengemis di Kota Malang?

3. Apa yang menjadi penyebab masih banyaknya gelandangan dan pengemis di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam mensejahterakan gelandangan dan pengemis di Kota Malang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mensejahterakan gelandangan dan pengemis di Kota Malang
3. Untuk mengetahui penyebab masih banyaknya gelandangan dan pengemis di Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperluas pengetahuan yang telah ada, baik internal ataupun eksternal. Berikut beberapa manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat membuka paradigma berfikir dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi sebagai pengembangan pada ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

a). Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menerapkan teori-teori terkini ke dalam skenario dunia nyata, sehingga dapat memperluas perkembangan intelektual mereka di dalam kelas.

b). Bagi Pihak Pemerintah Kota Malang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu Dinas Sosial Kota Malang meningkatkan keberlanjutan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Tabel 1.3 Sistematika Penulisan

SUB BAB	PENJELASAN
BAB I PENDAHULUAN	Pada Bab I Pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah yang menjelaskan permasalahan mengenai permasalahan tersebut pada bagian hasil/pembahasan, Tujuan mengetahui permasalahan ataupun isu-isu yang akan dibahas, Manfaat di sini menjelaskan dari manfaat yang diperoleh dari kegiatan penelitian untuk penulis maupun pembaca, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang berisikan kesimpulan dari setiap bab untuk mengetahui isian secara singkat dan jelas.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Pada Bab II Tinjauan Pustaka menjelaskan beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang dimana menjelaskan perbandingan atau sumber-sumber jurnal yang diteliti yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan judul sang peneliti yaitu tentang “Peran Dinas Sosial Dalam Mensejahterakan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Malang”, terfokuskan pada fokus penelitian, rumusan masalah, dan juga penggunaan teoritik pada jurnal dari berbagai sumber, yaitu selanjtnya yaitu pada bagian Novelty atau pembaharuan Penelitian yang dimana menjelaskan ringkasan perbedaan dan persamaan antara jurnal dengan jurnal yang akan diteliti dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada fokus penelitian dan juga penggunaan teoritik sehingga dapat disimpulkan, yang terakhir yaitu teoritik yang dimana pada pembahasan ini menjelaskan teori-teori yang digunakan oleh penulis berdasarkan sumber buku, ataupun jurnal.
BAB III METODE PENELITIAN	Pada Bab III Metode Penelitian menjelaskan dari pendekatan penelitian/jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dan juga data pada pendekatan penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang selanjutnya fokus penelitian pada bagian ini menjelaskan fokus titik permasalahan yang terjadi pada Lokasi penelitian, lokasi penelitian pada bagian ini menjelaskan Lokasi yang akan dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi ataupun data yang akan diolah oleh

	penulis pada Lokasi penelitian ini penulis melakukan penelitian pada kantor dinas sosial kota malang, sumber data pada sumber data ini terdapat dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder, pengumpulan data pada bagian ini dilakukan dengan cara observasi pada Lokasi penelitian, wawancara dapat dilakukan pada Lokasi Penelitian atau pada pihak Gelandangan dan Pengemis, dan yang terakhir dokumentasi dimana melakukan pengambilan gambar, video, atau rekaman yang berisikan kegiatan dalam penelitian, Instrumen pada bagaian ini berisikan bentuk penelitian yang dilakukan dengan itu sendiri, analisis data pada bagian ini menjelaskan data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian yang kemudia di olah menjadi singkat, dan yang terakhir keabsahan data dijelaskan bahwa data yang diperoleh adalah valid atau benar sesuai kebenaran yang ada.
BAB IV GAMBARAN SETTING PENELITIAN	Pada Bab IV Gambaran Setting Penelitian menjelaskan gambaran umum terkait Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis, gambaran tersebut dapat dilihat dari segi gambaran umum sekitar kantor penelitian seperti kondisi biografis dan topografis pada kantor yang akan diteliti, menggambarkan pada Kawasan atau Lokasi penelitian yang dituju seperti topografi penelitian dan juga demografis penelitian.
BAB V TEMUAN- TEMUAN PENELITIAN	Pada Bab V Temuan-Temuan Penelitian menjelaskan dari pengumpulan data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa hasil wawancara, observasi dan juga sesi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan secara langsung pada Lokasi penelitian.
BAB VI PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN	Pada Bab VII Pembahasan dan Temuan Penelitian Menjelaskan hasil penelitian di lapangan yang diperoleh oleh peneliti pada saat proses penelitian berlangsung melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Dari data yang diperoleh pada saat penelitian, peneliti melakukan meringkas data-data yang telah terkumpul yang kemudian melakukan pemilahan data-data tersebut dipilah mana data yang penting dan tidak penting yang kemudian dianalisis oleh peneliti yang berupa laporan atau bentuk lainnya.
BAB VII PENUTUP	Pada Bab VII Penutup Berisikan Kesimpulan dan saran-saran, pada Kesimpulan menjelaskan ringkasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui permasalahan dan penyelesaian. Pada saran berisikan pendapat usulan yang diberikan kepada narasumber kepada peneliti untuk memberikan pertimbangan dari permasalahan atau hal apapun. Dalam saran sendiri memberikan pendapat atau sebuah harapan untuk kedepannya.

Sumber : Data yang diolah Peneliti Tahun 2025

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada hasil dan data yang didapatkan oleh penelitian serta penjelasan yang sudah dipaparkan pada pembahasan diatas terkait peran Dinas Sosial dalam mensejahterakan gelandangan dan pengemis di Kota Malang, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Peranan yang dilakukan Dinas Sosial dalam mensejahterakan gelandangan dan pengemis di Kota malang

1. Fungsi Pencegahan.

Dinas Sosial Kota Malang telah memberikan penyuluhan ini. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan menyusul razia yang menangkap gelandangan dan pengemis, serta melakukan penangkapan dan penertiban sementara di panti ataupun shalter. Dalam rangka meningkatkan sikap dan perilaku anak berkebutuhan khusus agar dapat hidup normal kembali, Dinas Sosial Kota Malang bekerja sama dengan berbagai lembaga, antara lain lembaga bimbingan dan konseling serta psikologi, untuk memberikan bimbingan dengan menyelenggarakan kelas-kelas tersendiri.

2. Fungsi Penyembuhan

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosia melakukan kegiatan diawali dengan hasil penertiban dari operasi razia satpol PP terhadap para pengemis dan

gelandangan yang ada di jalanan selajutnya para gelandangan dan pengemis psikotik yang tertangkap akan di rujuk ke panti pskiotik, sedangkan gelandangan dan pengemis non psikotik akan di dibawa ke tempat penampungan atau sosial camp assessment milik Dinas Sosial guna melaksanakan sesuatu pendataan kepada para pengemis dan gelandangan guna mengetahui identitas dan keluarganya jika bukan warga Malang akan dipulangkan ke daerah asalnya. Jika mereka tidak memiliki keluarga maka akan di salurkan ke Panti Rehabilitasi Sosial untuk dilakukaknya rehabiltasi serta pelatihan pendampingan.

3. Fungsi Pengembangan

Dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis Dinas Sosial Kota Malang telah membantu mereka untuk berproses dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan demi mencapai kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup nya dengan adanya bantuan Pendidikan yang utama merupakan tonggak penting yang dalam kehidupan kedepannya. Beasiswa diberikan kepada para gelandangan dan pengemis dengan rentang usia pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sebagai bagian dari pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi individu tersebut.

4. Fungsi Penunjang

Dalam menunjang kesejahteraan gelandangan dan pengemis hal yang dilakukann yaitu memberikan pelayanan berupa kesehatan, keterampilan, dan

bantuan modal usaha untuk memulai usaha mandiri guna memenuhi kebutuhan dasar hidup, namun dalam menerima bantuan tersebut perlu adanya kriteria yang ditentukan seperti kondisi ekonomi, kesehatan, dan kemampuan mereka untuk menunjang keberhasilan usaha kedepannya. Masih adanya pengemis yang telah diberikan pembinaan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pelatihan tetapi masih kembali menjadi pengemis dan gelandangan. Hal ini tentu menjadikan pembinaan yang dilakukan sia-sia. Tetapi dari keterangan pihak gelandangan dan pengemis, ada yang menyalurkan hasil pelatihan serta ada juga yang kembali kejalan, dikarenakan sulitnya membuka usaha sendiri serta tidak ingin bekerja dengan orang lain ataupun tidak memiliki keinginan dan adanya ketidakpercayaan diri dari gelandangan dan pengemis.

Oleh sebab itu, Dinas Sosial Kota Malang terbukti bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Malang serta para profesional yang berkualifikasi di bidangnya untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berjalan cukup lancar, sejalan dengan perencanaan yang telah disusun Dinas Sosial Kota Malang serta sesuai aturan, visi, serta misi organisasi, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Mensejahterakan Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang

a. Faktor Pendukung

Letak geografis disini sangat mendukung dalam menunjang peran Dinas Sosial dalam mensejahterakan gelandangan dan pengemis yang berada di Kota

Malang dalam hal menangani permasalahan sosial. Diketahui jika kantor Dinas Sosial Kota Malang terletak ditengah-tengah kota yang berdekatan dengan kantor OPD lain sehingga memudahkan dalam berkoordinasi menindaklanjuti permasalahan sosial maupun dijangkau siapa saja. Dengan adanya Camp Assessment/Penampungan sedangkan gelandangan dan pengemis merupakan fasilitas yang disediakan untuk memberikan tempat tinggal sementara bagi orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Namun penampungan sementara ini bukan untuk jangka panjang tetapi memiliki batas waktu tinggal.

Dengan adanya pelayanan sosial dalam panti rehabilitasi diharapkan mereka mendapatkan pelayanan yang pantas dan layak dibandingkan berada di jalan ataupun di trotoar yang dinilai tidak layak untuk mereka tempati, selain itu juga fenomena gelandangan dan pengemis yaitu masalah sosial yang banyak menjadi perhatian masyarakat disekitar kita dan merusak pemandangan kota, sehingga apabila gelandangan dan pengemis berada di tempat penampungan meskipun hanya sementara dapat mengurangi pemandangan kota yang dipandang tidak pantas juga dapat sedikit mengurangi keresahan masyarakat bahwa mereka merupakan masalah sosial yang semakin marak disekitar masyarakat kita.

b. Faktor Penghambat

Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang masih tinggi serta menyebabkan dampak negative yaitu masalah sosial gelandangan serta pengemis, namun dalam pengimplementasian penanganan masalah ini belum cukup optimal dilakukan karena kurangnya integrasi antar pihak pemerintah dan masalahnya yang begitu kompleks. Maka dari itu diperlukan adanya campur tangan dari semua

pihak yang berperan aktif dalam permasalahan sosial sebagai terobosan dalam penguatan kebijakan. Serta Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan gelandangan dan pengemis adalah kondisi dimana masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam proses penanganan gelandangan dan pengemis, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, masyarakat harus mendukung para tunawisma serta pengemis; jika masyarakat tidak memberikan sumbangan berupa uang atau barang, jumlah tunawisma dan pengemis akan menurun. Namun, warga Kota Malang sangat welas asih, sehingga kita tidak bisa melarang mereka. Kemalasan di kalangan tunawisma dan pengemis di Kota Malang akan terus meningkat jika masyarakat sering memberikan uang atau barang. Terakhir, cara berpikir para pengemis dan tunawisma perlu diubah. Agar para tunawisma dan pengemis dapat meninggalkan jalanan dan memulai kehidupan yang lebih baik, diperlukan metode yang dapat mengubah pikiran, tindakan, dan perilaku negatif mereka menjadi baik.

3. Penyebab Masih Banyaknya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Malang

a. Faktor Internal

Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan fenomena yang mencerminkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Masalah ini menjadi tantangan serius karena menyangkut harkat dan martabat manusia, serta berdampak pada ketertiban umum dan citra kota atau daerah. Gepeng biasanya muncul dari kelompok masyarakat yang berada

dalam kondisi ekonomi lemah, tidak mempunyai pekerjaan tetap, tempat tinggal layak, beserta pendidikan yang memadai. Mereka turun ke jalan bukan semata-mata karena kemauan sendiri, tetapi lebih karena keterpaksaan akibat tekanan hidup. Dalam banyak kasus, mereka hidup berpindah-pindah, tidur di emperan toko, kolong jembatan, atau trotoar, serta menggantungkan hidup dari belas kasihan orang lain. Permasalahan ini juga kerap menjadi lingkaran setan. Ketika seseorang menjadi gepeng, ia terjebak dalam pola hidup yang sulit untuk keluar. Tanpa keterampilan, tanpa dukungan, dan sering kali tanpa dokumen kependudukan, mereka kesulitan mengakses bantuan sosial atau pekerjaan formal. Bahkan, tidak sedikit anak-anak yang dilibatkan dalam aktivitas mengemis oleh orang tuanya sendiri, sehingga menyebabkan permasalahan ini turun temurun.

b. Faktor Eksternal

Faktor keluarga dan lingkungan sosial juga memainkan peran penting. Ketika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang permisif terhadap praktik mengemis atau hidup di jalanan, maka perilaku tersebut bisa dianggap lumrah dan bahkan diturunkan dari generasi ke generasi. Anak-anak yang sejak kecil sudah terbiasa melihat atau diajak orang tuanya mengemis di jalanan akan cenderung mengikuti pola hidup yang sama. Dari sisi pemerintah dan masyarakat, kurangnya pengawasan serta belum optimalnya program pemberdayaan sosial juga memperpanjang keberadaan gepeng. Meskipun sudah ada program penertiban dan rehabilitasi, sering kali upaya tersebut tidak

berkelanjutan atau tidak menyentuh akar permasalahan, sehingga banyak gepeng kembali ke jalan setelah ditertibkan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan permasalahan peran Dinas Sosial dalam mensejahterakan gelandangan dan pengemis di Kota Malang, maka peneliti berharap agar direkomendasikan sebagai berikut:

Dalam hal ini harusnya pihak Dinas Sosial Kota Malang untuk bisa menyalurkan dan menempatkan gelandangan dan pengemis yang telah siap untuk bekerja di tempat yang memiliki atau membutuhkan pekerja sehingga mereka dapat langsung bekerja setelah pembinaan yang dilakukan.

1. Dengan adanya koordinasi dari berbagai instansi perlu diperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, serta lembaga sosial agar proses pemberdayaan ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menginisiasi program kolaboratif dengan melibatkan lembaga sosial, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam memberikan pelatihan keterampilan kerja dan pembinaan mental bagi gepeng. Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan teknis seperti menjahit atau berdagang tetapi juga mencakup pembinaan karakter, motivasi, dan pemahaman nilai kehidupan mandiri. Selain itu, hasil pelatihan harus ditindaklanjuti dengan pendampingan usaha dan akses modal, agar mereka benar-benar mampu beralih dari ketergantungan menjadi individu yang produktif dan berdaya secara ekonomi.

2. Dengan adanya permasalahan sosial gelandangan dan pengemis diharapkan pemerintah terutama Dinas Sosial mendampingi dan memastikan pola pikir mereka agar dapat hidup lebih layak dan mandiri. Dinas Sosial dapat menjalankan program pembinaan terpadu yang mencakup konseling psikologis, pelatihan motivasi, serta pendidikan dasar tentang pentingnya kemandirian dan kehidupan yang layak. Dalam program ini, gepeng dibimbing secara bertahap untuk memahami bahwa mengandalkan belas kasihan orang lain bukanlah solusi jangka panjang. Melalui pendekatan ini, mereka akan lebih terbuka terhadap perubahan pola pikir, termotivasi untuk memanfaatkan pelatihan keterampilan yang tersedia, dan diarahkan untuk memiliki tujuan hidup yang jelas. Dengan pendampingan yang berkelanjutan dan pendekatan yang manusiawi, diharapkan mereka mampu membangun kembali kepercayaan diri dan keluar dari siklus kehidupan jalanan.
3. Dalam peranan Dinas Sosial dalam mensejahterakan gelandangan dan pengemis di Kota Malang terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peneliti berharap dengan adanya faktor – faktor tersebut dalam memperkuat program pelaksanaan dapat dievaluasi secara rutin sekaligus menyesuaikan strategi yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Dinas Sosial perlu melaksanakan evaluasi program secara rutin dan menyeluruh dengan melibatkan instansi terkait, lembaga sosial, serta perwakilan masyarakat, guna mengidentifikasi secara jelas faktor pendukung seperti ketersediaan fasilitas pelatihan, dukungan anggaran, dan keterlibatan masyarakat,

maupun faktor penghambat seperti kurangnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan tenaga sosial, atau sikap pasif dari para gepeng sendiri. Evaluasi ini penting untuk menyempurnakan pelaksanaan program, menyesuaikan strategi yang kurang efektif, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar setiap langkah pemberdayaan benar-benar tepat sasaran dan mampu menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan bagi kehidupan para gepeng di Kota Malang.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

Dirjen Paudi. 2010. *Apa dan Bagaimana Pembinaan Kursus dan Kelembagaan*.

Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.

Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Adiatma.

Irawan, Dimas. 2013. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher.

Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenologi (fenomena pengemis kota bandung)*. Bandung: Widya Padjajaran 2.

Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

Moleong, L.J. 2016. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L.J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad Lukman Hakim. 2020. *Kebijakan Penanggulangan Kesejahteraan Sosial - Tantangan dan Strateginya*. Malang: Inteligensia Media.

Murdiyanto. 2012. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial(PKSK) Di Daerah Tertinggal*. Yogyakarta: B2P3KS Press.

Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Siagian. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar, Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara-Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.

Syamsi, Ibnu dan Haryanto. 2018. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press.

Tursilarini, Teteki Yoga dkk. 2009. *Kajian Model Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*. Yogyakarta: Citra Media.

Wibhawa, Budi dkk. 2015. *Pengantar Pekerja Sosial*. Bandung: UNPAD PRESS.

Sumber Jurnal dan Skripsi

Dewantoro, Aji. 2019. *Implementasi Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Pengemis di Kota Tangerang*. Fakultas Ilmu Politik dan Sosial. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. <http://eprints.untirta.ac.id/1295/>

Marlina Damuhu, Sarah Sambiran, dan Neni Kumayas. 2018. *Peran Pemerintah Kota Manado Dalam Mengatasi Masalah Sosial Terhadap Pengemis*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/19806>

Nusanto, Baktiawan. 2017. PROGRAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER. Jurnal Politico Vol. 17 No. 2 Halaman 339-360. <https://core.ac.uk/reader/229209930>

Rahmatika, Athia. 2018. *Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/34119/>

Zainal Fadri, upaya penanggualangan Gelandangandan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta, jurnal pengembangan Masyarakat Islam IAIN Batusangkar, Vol. 10, No 1 Juni 2019. h. 5

Zikri, Muhammad. 2021. *Peranan Dinas Sosial Dalam Merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kota Medan*. Fakultas Hukum.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

<http://repository.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/15543>

Sumber dari Internet

Kurniawan, Aris. 2022. Kesejahteraan Sosial – Pengertian, Pendekatan, Tujuan, fungsi, Kriteria, Lembaga, Para Ahlisosial – Pengertian, Pendekatan, Tujuan, fungsi, Kriteria, Lembaga, Para Ahli
<https://www.gurupendidikan.co.id/kesejahteraan-sosial/>

Achamad, Tubagus. 2021. Begini Penanganan Anjal dan Gepeng oleh Dinsos-P3AP2KB Kota Malang.
<https://www.malangtimes.com/baca/67284/20210512/180000/begini-penanganan-anjal-dan-gepeng-oleh-dinsos-p3ap2kb-kota-malang>

Riadi, Muchlisin. 2022. Gelandangan dan Pengemis - Kriteria, Jenis, Penyebab dan Penanggulangan. <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html>

Prawiro, M. 2018. Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>

Febryarumrh. 2014. ★★ Kerangka ★★ Referensi Peksos. <https://swcorner.wordpress.com/2014/10/27/kerangka-referensi-peksos/>

Sumber dari Undang – undang:

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang – Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kota Malang No 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis